

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI
UMUM DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH**
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2015-2017)



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

Oleh:

EVAN HERNANDO

B 200150010

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

**(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun
2015-2017)**

PUBLIKASI ILMIAH

oleh:

EVAN HERNANDO

B 200150010

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing


Dr. Triyono S.E., M.Si.

NIDN. 0627016801

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
JAWA TENGAH**

**(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun
2015-2017)**




**OLEH
EVAN HERNANDO**

B 200150010

Telah dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 12 November 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Dr. Triyono, S.E., M.Si.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Mujiyati, M.Si.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Drs. Atwal Arifin, Akt., M.Si.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()



Dr. Syamsudin, SE., MM

NIDN 0017025701

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 12 November 2019

Penulis



EVAN HERNANDO
B200150010

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM
DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI JAWA TENGAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah tahun
2015-2017)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di provinsi jawa tengah tahun 2015-2017. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari BPKAD, DPMPTSP dan BPS Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2017. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 35 kabupaten/kota selama tiga tahun. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Alat uji yang digunakan meliputi uji regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: kinerja keuangan pemerintah daerah (KKPD), pertumbuhan ekonomi (PE), dana alokasi umum (DAU), belanja modal (BM).

Abstract

The purpose of this research to analyze the influence of economic growth, general allocation fund, and capital expenditure of the financial performance of local governments in the district or city in Central Java Province in 2015-2017. This research used quantitative method with secondary data obtained from BPKAD, DPMPTSP and BPS districts and cities in Central Java year 2015-2017. Population in this research is all district or city in Central Java in 2015-2017. Amount of sample in this study were 35 district/city for 3 years. Method of sample collection used purposive sampling techniques. The analyst method used multiple linear regression tests. The result analysis can be conclude that the variable general allocation fund had an influence on the financial performance of local governments. Economic growth and capital expenditure have no effect on the financial performance of local governments.

Keywords: regional government financial performance, economic growth, general allocation funds and capital expenditures.

1. PENDAHULUAN

Sebuah perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur keselarasan dalam meningkatkan pembangunan ekonomi berskala

nasional. Dalam meningkatkan perekonomian, pemerintah telah berperan aktif dalam mengelola keuangan daerah secara merata. Adanya pengelolaan keuangan dari pemerintah pada suatu daerah guna untuk mencapai tujuan perekonomian nasional serta untuk kesejahteraan rakyat.

Dana alokasi umum dialokasikan kepada setiap daerah dalam rangka menjalankan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Dana alokasi umum yang merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat “block grant”, yang berarti daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Menurut Sudarsana (2013), besarnya dana alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang bersumber dari APBN.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004, pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi daerah secara luas, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. Selain itu, otonomi daerah berguna untuk memenuhi tujuan kedaerahan dan memberikan kebebasan untuk mengatur daerahnya sendiri meskipun masih terikat dengan negara. Otonomi daerah juga mampu menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menganalisis potensi apa yang dapat menyebabkan meningkatkan suatu perekonomian daerah. Indikator yang digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Disisi lain, kebijakan yang selaras akan kondisi disuatu daerah, dapat memicu adanya potensi pertumbuhan ekonomi secara signifikan. Serta, pemerintah daerah diharapkan lebih mampu melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana publik. Pembangunan tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara mandiri baik dari sisi perencanaan, pembangunan, maupun pembiayaan.

Pertumbuhan ekonomi secara umum diartikan dengan perkembangan dari suatu kegiatan ekonomi yang dapat menyebabkan barang serta jasa yang telah

diproduksi di dalam masyarakat akan bertambah serta kemakmuran masyarakat meningkat (Sularso, 2011 dalam Wilujeng, 2014). Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan kebijakan yang baik dan tepat sasaran dari pemerintah daerah. Penetapan kebijakan memerlukan informasi dan identifikasi sektor-sektor ekonomi daerah baik tingkat efisiensi maupun karakteristik siklus bisnis nya. Dengan demikian, dukungan kebijakan bagi sektor-sektor yang membutuhkan akan dapat mendorong peningkatan kinerja ekonomi daerah periode mendatang.

Todaro (2016) dalam Chandra (2015) pertumbuhan ekonomi dapat menyeimbangkan dan menyelaraskan pengelolaan kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah. Kemajuan ekonomi suatu daerah menunjukkan keberhasilan suatu pembangunan meskipun bukan merupakan satu-satunya indikator keberhasilan pembangunan. Adapun manfaat dari pertumbuhan ekonomi yaitu untuk mengukur kemajuan ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional serta pendapatan perkapitanya dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk, sebab semakin meningkatnya pendapatan perkapita dengan kerja konstan semakin tinggi pula tingkat kemakmuran penduduk dan juga produktivitasnya.

Menurut Pratiwi (2018), kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis suatu organisasi. Menurut Mardiasmo (2009: 121) “pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik”. Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Chow, Ganulin, Haddad, dan Wiliamson, 1998).

Salah satu alat untuk menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, rasio kemandirian keuangan daerah,

rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio keserasian dan pertumbuhan (Sularso dan Restianto, 2011). Rasio yang dapat digunakan dalam menganalisis rasio keuangan terhadap APBD salah satunya yaitu rasio kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan daerah (Halim, 2007:232).

Selain pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan juga unsur yang dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu belanja modal. Menurut Tanjung (2017), belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk menambah aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Erlina dan Rasdianto, 2013:46), yang secara langsung membawa dampak positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal dapat dikatakan membawa dampak positif aset tetap berwujud itu akan berguna untuk menunjang kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti adanya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana publik maupun pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

2. METODE

Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena empiris yang disertai statistik, karakteristik dan pola hubungan antar variabel. Di dalam penelitian ini, hubungan atau pengaruh yang diteliti meliputi pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian ini diperoleh dari BPS, BPKAD dan DPMPTSP selama periode 2015-2017.

Populasi dalam penelitian ini adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 29 daerah kabupaten dan 6 daerah kota selama 3 tahun

pengamatan, sehingga daerah total populasi adalah 105 data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling*, karena *purposive* dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria pengambilan sampel pada penelitian ini adalah Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah yang melaporkan secara lengkap dalam Realisasi APBD pada tahun anggaran 2015-2017.

Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dengan periode pengamatan tahun 2015-2017, yang diperoleh melalui BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

Metode analisa data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji asumsi klasik dengan analisa regresi linier berganda.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Proses Penentuan Sampel

Keterangan	Jumlah
Jumlah seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2017	105
Jumlah sampel yang tidak sesuai dengan kriteria	0
Jumlah sampel	105
Data outlier	(26)
Jumlah sampel yang dapat diolah	79

3.1 Hasil Uji Regresi Linier

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Sig.
(Constant)	0,460	3,962	0,000
PE	0,532	0,392	0,697
DAU	-0,578	-3,708	0,000
BM	-0,093	-0,746	0,458
Rsquare	= 0,160	F _{hitung}	= 4,749
Adjusted Rsquare	= 0,126	Sig	= 0,004 ^b

Berdasarkan tabel di atas diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut:

$$KKPD = 0,460 + 0,532 PE - 0,578 DAU - 0,093 BM + \varepsilon \quad (1)$$

3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

Tabel 3. Uji Normalitas

Variabel	Kolmogorov-Smirnov	Asymp. Sig (2-tailed)	Keterangan
Unstandarized Residual	0,920	0,366	Data Terdistribusi Normal

Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil nilai Asymp.Sig (2-tailed) diperoleh sebesar 0,366, sehingga nilai tersebut lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
PE	0,993	1,007	Tidak Terjadi Multikolineritas
DAU	0,950	1,053	Tidak Terjadi Multikolineritas
BM	0,955	1,047	Tidak Terjadi Multikolineritas

Berdasarkan Tabel 4 menunjukan bahwa seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model atau variabel independen tidak terjadi multikolineritas.

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
PE	0,254	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
DAU	0,520	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
BM	0,985	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa hasil output uji heteroskedastisitas dengan menggunakan metode uji Glejser, semua variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas, karena mempunyai nilai sig lebih besar dari 0,05.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

<i>Runs Test</i>	Unstandardized Residual	Kesimpulan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,090	Tidak terjadi autokorelasi

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil output uji autokorelasi (*Runs Test*) diketahui nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar $0,090 > 0,05$, sehingga

dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi autokorelasi.

3.3 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Tabel 7. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,026	3	,009	4,749	,004 ^b
Residual	,136	75	,002		
Total	,161	78			

Uji signifikansimodel atau seringdisebut juga Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruhvariabel PE, DAU dan BM secara bersama-sama terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan hasil pada Tabel 6 diatas, diketahui bahwa nilai F_{hitung} sebesar 4,749 dan F_{tabel} sebesar 2,72 apabila dibandingkan $F_{hitung}(4,749)$ lebih besar dari $F_{tabel} (2,72)$. Hasil pengujian dapat dilihat juga signifikasi sebesar (0,004) lebih kecil dari 0,05, maka model diatas sudah tepat (goodness of fit). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.4 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Tabel 8. Hasil Uji t

VARIABEL	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig.	KETERANGAN
PE	0,392	1,99210	0,697	H ₁ Ditolak
DAU	-3,708	1,99210	0,000	H ₂ Diterima
BM	-0,746	1,99210	0,458	H ₃ Ditolak

Berdasarkan Tabel 7 diatas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- 3.4.1 Pada variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai sig sebesar (0,697) lebih besar dari 0,05 dan/atau t_{hitung} (0,392) lebih kecil dari t_{tabel} (1,99210) maka H₁ ditolak, yang artinya variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 3.4.2 Pada variabel dana alokasi umum menunjukkan nilai sig sebesar (0,000) lebih kecil dari 0,05 dan/atau t_{hitung} (-3,708) lebih besar dari t_{tabel} (1,99210) maka H₂ diterima, yang artinya variabel dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
- 3.4.3 Pada variabel belanja modal menunjukkan nilai sig sebesar (0,458) lebih

besar dari 0,05 dan/atau t_{hitung} (-0,746) lebih kecil dari t_{tabel} (1,99210) maka H_3 ditolak, yang artinya variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.5 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9. Hasil Uji R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,400 ^a	,160	,126	,0425201

Berdasarkan Tabel 8 menunjukkan nilai koefisien determinasi (Adj R2) sebesar 0,126. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen dalam model pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum dan belanja modal menjelaskan variabel dependen kinerja keuangan pemerintah daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sebesar 12,6% dan sisanya sebesar 87,4% dijelaskan oleh faktor atau variabel lain di luar model.

3.6 Pembahasan

3.6.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai sig sebesar (0,697) lebih besar dari 0,05 dan/atau t_{hitung} (0,392) lebih kecil dari t_{tabel} (1,99210) maka H_1 ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yang berarti kenaikan atau penurunan pertumbuhan ekonomi tidak akan mempengaruhi tingkat kemandirian keuangan daerah, sehingga tidak sesuai dengan teori yang diyakini. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis awal yang meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Secara agregat, pada tabel IV.2 pertumbuhan ekonomi yang tertinggi adalah Kabupaten Kebumen sebesar 6,28% pada tahun 2015 dengan tingkat kemandirian keuangan daerahnya sebesar 11,90% pada tahun 2015. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang terendah yaitu Kabupaten Wonosobo sebesar

4,67 % pada tahun 2015 dengan tingkat kemandirian keuangan daerahnya sebesar 16,35%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Wonosobo jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Kebumen, namun memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi daripada Kabupaten Kebumen. Ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih banyak pada sektor pengeluaran, yang tidak berkontribusi pada pendapatan asli daerah. Sehingga pertumbuhan ekonomi tidak ada kaitannya terhadap tingkat kemandirian karena untuk memicu tingkat kemandirian itu disebabkan dari banyaknya DAU. Semakin tinggi DAU semakin rendah tingkat kemandirian. Dengan demikian alasan yang menyebabkan variabel ini tidak berpengaruh adalah pemerintah daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang tinggi, sehingga banyak pemerintah daerah yang pertumbuhan ekonominya tinggi ternyata tingkat kemandirian keuangan daerahnya masih dibawa rata-rata. Namun ada juga pemerintahan daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah diatas rata-rata. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wilujeng (2014), Pasaribu (2015), Tolosang (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Fitri (2017), Triganda (2018) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.6.2 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel dana alokasi umum menunjukkan nilai sig sebesar (0,000) lebih kecil dari 0,05 dan/atau thitung (-3,708) lebih besar dari ttabel (1,99210) maka H2 diterima. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal

ini dapat mencerminkan bahwa peran dari dana alokasi umum dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Alasannya temuan dalam penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Machmud dan Lukfiah (2014) dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Perbedaan ini terjadi karena ukuran yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah rasio efisiensi belanja. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan rasio kemandirian. Secara agregat, pada tabel IV.2 dana alokasi umum yang tertinggi adalah Kabupaten Pemalang sebesar 56,71% pada tahun 2016 dengan tingkat kemandirian keuangan daerahnya sebesar 15,07% pada tahun 2016. Apabila dibandingkan dengan dana alokasi umum yang terendah yaitu Kabupaten Pati sebesar 42,84 % pada tahun 2017 dengan tingkat kemandirian keuangan daerahnya sebesar 19,46%. DAU pada Kabupaten Pati jauh lebih rendah dibandingkan Kabupaten Pemalang, namun memiliki tingkat kemandirian keuangan daerah yang lebih tinggi daripada Kabupaten Pemalang. Semakin meningkatnya DAU maka semakin rendah tingkat kemandirian keuangan daerah. Dimana semakin sedikit dana dari pemerintah pusat yang memberikan kontribusi dana kepada pemerintah daerah, maka tingkat kemandirian dalam daerah tersebut dapat dikatakan baik, karena sudah berhasil dalam mengelola keuangan daerahnya sendiri tanpa kontribusi dari dana pemerintah pusat. Hal ini berarti jika DAU yang dialokasikan Pemerintah Pusat ke daerah relatif besar maka daerah tersebut dikatakan kurang mandiri karena daerah tersebut masih mengandalkan dana dari pemerintah pusat sebagai penerimaan utamanya. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavianti (2016), Susanti dan Asri (2018), yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jauhar (2016), Machmud dan Lukfiah (2018) yang menyatakan bahwa dana alokasi

umum tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

3.6.3 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel belanja modal menunjukkan nilai sig sebesar (0,458) lebih besar dari 0,05 dan/atau thitung (-0,746) lebih kecil dari ttabel (1,99210) maka H3 ditolak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, hal ini dapat mencerminkan bahwa peran dari belanja modal belum dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Alasannya belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya yaitu pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang bersifat mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Semakin besar porsi belanja modal pemerintah daerah terhadap belanja daerah dalam waktu yang lama akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang berdampak pada kinerja pemerintah daerah yang lebih baik, akan tetapi besarnya proporsi belanja modal tidak selalu menghasilkan sumber-sumber keuangan secara langsung bagi daerahnya, jika belanja modal yang sesungguhnya bermanfaat bagi perkembangan di daerah tersebut maka akan menjadi kurang berguna dan efektif ketika pemerintah daerah salah dalam mengalokasikan belanja modal yang tidak sesuai dengan daerahnya, sehingga tidak akan berpengaruh kepada daerah tersebut dan masih terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan belanja modal untuk melakukan tindakan korupsi, maka hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang akan menurun dan dapat merugikan pemerintah yang akan berpengaruh kepada menurunnya kinerja keuangan pemerintah dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hasil penelitian ini didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jauhar (2016), Wiguna (2014), Purwasih (2017), Susanti dan Asri (2018) yang

menyatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andirfa, et al (2016), Muhayanah (2016), Antari dan Ida (2018), Pratiwi (2018) yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil simpulan sebagai berikut: (a) Variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis pertama ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar (0,697) lebih besar dari 0,05 dan/atau thitung (0,392) lebih kecil dari ttabel (1,99210). (b) Variabel dana alokasi umum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis kedua diterima. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar (0,000) lebih kecil dari 0,05 dan/atau thitung (-3,708) lebih kecil dari ttabel (1,99210). (c) Variabel belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis ketiga ditolak. Hal ini dibuktikan dengan nilai sig sebesar (0,458) lebih besar dari 0,05 dan/atau thitung (-0,746) lebih kecil dari ttabel (1,99210).

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, Mulia., Hasan Basri., M. Shabri A. Majid. (2016). *Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Aceh*. Jurnal Magister Akuntansi. ISSN 2302-0164. Volume 5, No. 3, Agustus 2016
- Antari, Ni Putu Gina Sukma., Ida Bagus Panji Sedana. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. E-Jurnal Manajemen Unud. ISSN: 2302-8912. Vol. 7, No. 2, 2018
- Aryanti, Harnida Gigih dkk. (2014). *Ekonomi: Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial*. Intan Pariwara, Klaten, 2014
- Chandra, Taufik., Amiruddin K. (2015). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengembangan Sektor Potensial di Kota Makassar*. Jurnal UIN. Vol. 1,

No. 2, 2015. Diambil dari: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Iqtisaduna/article/view/1248>

Erlangga, Engga. (2015). *“Perbandingan Indikator Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Lampung”*. Skripsi. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2015

Fajar, Muhammad. (2016). *“Perbandingan Kinerja Peramalan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Antara ARMA, FFNN dan Hybrid ARMA-FFNN”*. Skripsi. Universitas Padjadjaran. Bandung, 2016

Fathullah, Veralia. (2013). *“Korelasi Motivasi Dan Kompensasi Dengan Kinerja Pegawai Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (DP2KAD) Kabupaten Lampung Timur”*. Tesis. Universitas Lampung. Bandar Lampung, 2013

Indriyanti, Rika. (2016). *“Pengaruh Dana Bagihasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015)”*. Universitas Komputer Indonesia. Bandung, 2016

Jauhar, Fauzan. (2016). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Se Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi. Vol. 4, No. 1, 2016

Lubis, Putri Kemala Dewi., Nurlia Hafni. (2017). *“Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2011-2013”*. Vol. 1. No. 1 Januari - Juni 2017

Machmud, Joice., Lukfiah Irwan Radjak. (2018). *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo*. Journal Of Accounting Science. EISSN 2548-3501. Vol. 2, No. 1, Januari 2018.

Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Marizka, Reza. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011)*. Artikel Ilmiah. Universitas Negeri Padang. Padang, 2013.

Mondes, Mohar. (2016). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Perspektif

Pembiayaan dan Pembangunan Daerah. ISSN: 2338-4603 (print); 2355-8520 (online). Vol. 4, No. 2, Oktober-Desember 2016

Mubasiroh, Lailatul. (2018). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010-2016”*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta, 2018

Muhayanah, Fisa Aprilia. (2016). *“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013”*. Diambil dari: <http://eprints.ums.ac.id/43837/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf>

Nasution, Nina Andriany., Fitri Yani Panggabean. (2017). *Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Sumatera Utara*. ISSN: 2087 – 4669. Vol. 8, No.1, Juli 2017

Oktavianti, Rika. (2016). *“Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi DIY”*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta. Yogyakarta, 2016

Pasaribu, Alex Leo Suyadmoko. (2015). *“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Utara”*. Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Medan, 2015

Patmiasari, Mirna. (2017). *“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2011-2015”*. Jurnal Simki-Economic Vol. 01 No. 05 Tahun 2017

Pratiwi, Tri Yuni. (2018). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2012-2016*. Diambil dari: [https://eprints.uny.ac.id/60408/1/SKRIPSI TRI%20YUNI%20PRATIWI_16812147023.pdf](https://eprints.uny.ac.id/60408/1/SKRIPSI_TRI%20YUNI%20PRATIWI_16812147023.pdf)

Purwasih. (2017). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota DIY tahun 2011–2016)*. Diambil dari: <http://repository.upy.ac.id/1687/1/Artikel.pdf>

Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah

- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Keuangan Daerah
- Republik Indonesia. (2014). Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Saputra, Dori. (2014). *Analisis Kemandirian Dan Efektivitas Keuangan Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Propinsi Sumatera Barat*. Jurnal Akuntansi. Vol. 2, No.1. 2014
- Sucipto. (2013). “*Penilaian Kinerja Keuangan*”, Jurnal Akuntansi. Universitas Sumatra Utara. Medan, 2013
- Sudarsana, Hafidh Susila. 2013. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang, 2013
- Sularso, Havid., Restianto, Yanuar E. 2011. Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Media Riset Ekonomi. Purwokerto
- Susanti, Refi., Asri Eka Ratih. 2018. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau Periode 2011-2016*. Jurnal Revi. Tanjungpinang: Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH). Diambil dari: <http://repository.umrah.ac.id/1585/1/JURNAL%20REVI.pdf>. (Januari 2019)
- Suwandi, Kurni Adi., Afrizal Tahar. (2015). *Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Dengan Alokasi Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota D.I. Yogyakarta)*. Jurnal InFestasi. Vol. 11, No.2, Desember 2015. Yogyakarta, 2015
- Tanjung, Rizka Awlia Putri. (2017). “*Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah (Studi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Labuhanbatu)*”. Skripsi. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Medan, 2017
- Tolosang, Krest D. (2018). “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kota Tomohon*”. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 18, No. 03, Tahun 2018. Manado, 2018